



YAYASAN MANSYA'UL HUDA
MADRASAH ALIYAH MANSYA'UL HUDA
Des. Pandanwangi RT. 09 RW. 03 Des. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang
NPSN : 69886188 NSM : 131235080045

AMBK – MA MANSYA'UL HUDA

NAMA PESERTA :

NISN :

No PESERTA :

MAPEL : PPKn

Bacalah Teks berikut untuk menjawab soal Nomor 1-4!

Media Sosial Dijadikan Alat Propaganda

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melaju dengan begitu pesat. Kini banyak orang-orang dengan mudah menjadi jurnalis dan komentator amatiran di media sosial. Walaupun tidak semuanya mendapatkan dasar ilmu di bidang tersebut.

Siapa saja mampu merespons informasi yang tersebar dengan cepat. Bahkan mendadak menjadi seorang jurnalis fotografi yang mampu menyebarkan informasi ataupun berita yang diperkuat dengan dokumentasi gambar. Jika terus terjadi seperti yang diceritakan diatas, tanpa berbanding lurus dengan ilmu yang dimiliki, tidak heran jika kini banyak bertebaran berita bohong (hoaks) dan berita penyebar kebencian (hate speech).

Dengan kemajuan informasi yang begitu cepat, publik difasilitasi oleh teknologi yang dapat memperburuk keadaan. Berita hoaks dan ujaran kebencian dapat begitu mudah tersebar dengan adanya media sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun aplikasi mobile phone seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya. Di mana pada media-media komunikasi dan informasi tersebut tidak dapat dilakukan filtrasi di awal. Dampaknya adalah jika berita hoaks dan ujaran kebencian tersebut dilihat oleh orang-orang yang mudah percaya, maka akan disebarkan kembali melalui media sosial ataupun messenger application yang dimilikinya. Dan hal ini akan terjadi terus-menerus, dan berulang. Akibatnya banyak publik yang terpengaruh dengan berita hoaks dan ujaran kebencian. Dampak yang lebih besar adalah, memungkinkan adanya penggiringan opini yang dapat menyudutkan satu pihak atau menimbulkan kepanikan.

Suatu fenomena pemberitaan hoaks dan ujaran kebencian yang sudah cukup meluas. Hoaks dan ujaran kebencian banyak tersebar melalui media sosial ataupun broadcast messenger yang dapat memberikan efek propaganda terhadap pembacanya. Menariknya, media sosial berperan penting dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Sebab, media sosial adalah sebuah media online, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi.

Sebuah pertanyaan besar muncul mengenai bagaimana cara mengetahui berita tersebut merupakan hoaks atau ujaran kebencian yang menuju pada propaganda? Perlu diketahui bahwa propaganda rawan terhadap praktik-praktik penipuan yang biasa dilakukan melalui propaganda yang perlu diwaspadai seseorang. Setidaknya ada 9 cara mengetahui berita tersebut merupakan hoaks atau ujaran kebencian yang menuju pada propaganda di antaranya memberi julukan atau name calling, gemerlap atau glittering generalities, pengalihan atau transfer, pengakuan atau testimonial, flain folks, pengikut atau bandwagon, mamakai fakta atau card stacking, kecurigaan penuh emosi atau emotional stereotype, dan retorika.

Memberi julukan atau name calling yakni cara yang digunakann untuk menjelek-jelekan seseorang dengan memberi gelaran yang lucu atau sinis sehingga orang yang dipengaruhi benar-benar yakin. Gemerlap atau glittering generalities yakni propaganda yang menggunakan kata-kata bombastis sehingga orang tanpa sadar mengikutinya. Pengalihan atau transfer yakni teknik propaganda yang dilakukan dengan cara pengalihan pada objek lain. Sedangkan untuk pengakuan atau testimonial adalah teknik pengakuan dengan menggunakan nama orang terkenal seperti bintang film dan olahragawan. Flain folks yaitu teknik yang sering dipakai politisi untuk mempengaruhi orang banyak. "Pengikut atau

bandwagon yakni teknik yang ditujukan kepada orang-orang yang berpengaruh seperti kepala kantor, pemimpin partai, kepala desa, dan lain sebagainya. Sedangkan fakta atau card stacking digunakan untuk mencoba mengemukakan fakta untuk meyakinkan orang lain. Kecurigaan penuh emosi atau emotional stereotype yaitu teknik propaganda untuk menumbuhkan rasa curiga yang penuh emosi. Retorika yakni teknik yang digunakan dengan memilih kata-kata yang bisa menarik seseorang sehingga orang itu bisa menuruti kehendaknya.

1. Jika dikaitkan dengan nilai Pancasila, maka bertentangan dengan nilai Pancasila terutama nilai
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - c. Persatuan Indonesia
 - d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
 - e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Sikap yang harus dilakukan agar terhindar dari hal negatif (hoaxes, ujaran kebencian, dan propaganda) penggunaan media sosial yaitu
Pilihlah 3 jawaban benar!
 - a. Memfilterasi pesan-pesan yang masuk dari media sosial
 - b. Membaca dengan teliti informasi yang diterima dari media sosial
 - c. Selalu mengeshare pengumuman yang didapat dari media sosial
 - d. Ikut menyebarkan informasi yang judulnya bombastis supaya viral
 - e. Melaksanakan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari
3. Jawablah pernyataan dibawah ini dengan memilih B jika “Benar” dan S “Salah”
 - a. Berita hoaks dan ujaran kebencian dapat begitu mudah tersebar dengan adanya media sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, dll. (B-S)
 - b. Berita hoaks dan ujaran kebencian lebih mudah menyebar melalui media cetak seperti koran dan majalah. (B – S)
 - c. Teknologi dapat memperburuk keadaan jika pengguna tidak memfilterasi diawal. (B-S)
4. Cocokkanlah argument berikut!

Premis	Respon
1) Tokoh politisi digunakan untuk mempengaruhi orang banyak	a) Retorika
2) Curiga dan berkomentar negative dimedsos	b) Flain Floks
3) Menggunakan kata-kata menarik agar orang mau mengikuti	c) Kecurigaan Penuh Emosi

Bacalah Artikel Berikut untuk menjawab soal no 5-8!

Keunikan Budaya diIndonesia

Indonesia Negara terunik didunia. Keunikan itu karena Indonesia punya 1001 budaya dan adat istiadat yang berbeda disetiap daerah. Salah satu budaya rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih terus dilestarikan yaitu upacara adat. Upacara adat dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan juga untuk kematian. Upacara adat untuk kematian yang unik diIndonesia diantaranya yaitu: upacara *Ngaben* di Bali, upacara *Rambu Solo* di Toraja dan *ikipalin* di Papua.

Upacara *Ngaben* merupakan upacara pembakaran Jenazah (pengabuan orang Bali) yang abunya dilarung ke sungai atau laut. Uniknya upacara *Ngaben* terletak pada alat yang digunakan untuk pembakaran jenazah berupa patung yang dihias dengan tokoh-tokoh Bali. Selain Bali, Tanah Toraja juga mempunyai keunikan sendiri dalam upacara pemakaman Jenazah yang disebut dengan *Rambu Solo*. Biasanya, upacara ini dilaksanakan beberapa bulan bahkan sampai bertahun-tahun dari meninggalnya seseorang karena waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk upacara tersebut besar. Uniknya dalam upacara *Rambu Solo* penuh dengan kemeriahan. Mereka memotong

beberapa ekor kerbau dan babi untuk dibagikan kepada warga sekitar. kemudian jenazah akan disemayamkan dari lumbung rumah tongkonan ke Lakkean.

Upacara adat kematian yang unik terakhir yaitu *Ikipalin* yang dilakukan oleh Suku Dani Papua. Mereka akan memotong jari sebagai bentuk rasa sedih dan rasa kehilangan anggota keluarga. Walaupun bentuk upacara beda setiap daerah tapi tujuannya sama mendoakan keluarga yang meninggal. Keunikan budaya jika tetap kita jaga dan lestarikan maka akan memupuk jiwa gotong royong, kebersamaan bahkan juga mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut.

5. Mengapa Suku Toraja melaksanakan upacara pemakaman jenazah "Rambu Solo" beberapa bulan hingga tahun sejak seseorang meninggal?
 - a. Ingin menyimpan jenazah agar selalu dekat keluarga
 - b. Waktu dan biaya yang dikeluarkan cukup besar
 - c. Harus membuat peti jenazah yang unik
 - d. Ingin upacara penuh kemeriahan
 - e. Agar bisa memotong kerbau dalam jumlah banyak
6. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan budaya di Indonesia? (Pilih tiga jawaban benar!)
 - a. Memaksakan orang lain mengikuti budaya kita
 - b. Menghormati upacara adat suku lain disekitar kita
 - c. Mengetahui budaya lain sebagai bentuk apresiasi
 - d. Menganggap budaya kita saja yang perlu dilestarikan
 - e. Membiarkan orang lain mengembangkan budayanya
7. Jawablah pernyataan dibawah ini dengan memilih B jika "Benar" dan S "Salah"
 - a. Upacara adat di Indonesia yang masih sering dilakukan hanya Upacara Ngaben (B-S)
 - b. Upacara adat dilakukan hanya untuk mengenang kematian seseorang (B-S)
 - c. Indonesia mempunyai keragaman adat istiadat seperti upacara kehamilan, upacara pernikahan, hingga upacara kematian (B-S)
8. Cocokkanlah argument berikut!

1. Upacara Pembakaran Jenazah di Bali	a. Upacara IkiPalin
2. Upacara pemakaman Jenazah di Papua	b. Upacara Rambu Solo
3. Upacara pemakaman Jenazah Suku Toraja	c. Upacara Ngaben

9. Indonesia pernah berselisih dengan negara-negara tetangga, diantaranya negara Malaysia dan Singapura. Indonesia pernah berselisih dengan Malaysia perihal kepemilikan Pulau Sipadan dan Lingitan. Bahkan baru-baru ini kedua negara seRumpun ini berselisih terkait budaya Reog Ponorogo. Masyarakat Indonesia pada waktu itu sangat kecewa. Mereka menggelar aksi demonstrasi. Mereka meminta agar pemerintah bersikap tegas. Bila perlu seluruh masyarakat siap konfrontasi dengan Malaysia. Akan tetapi, Indonesia tetap memilih cara lain. Indonesia memilih membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. Kondisi tersebut membuktikan bahwa Indonesia telah melaksanakan salah satu prinsip penyelenggaraan pertahanan negara, yaitu
 - A. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan
 - B. Bangsa Indonesia cinta perdamaian tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya
 - C. Bangsa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif
 - D. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi
 - E. Bangsa Indonesia tidak terikat pada suatu fakta pertahanan tertentu
10. Saat kesenian Reog Ponorogo dilirik dan diklaim milik negara Tetangga tentu mengusik Nasionalisme Bangsa. Berdasarkan fenomena tersebut, upaya bela negara yang dapat anda lakukan adalah
 - a. Memutuskan hubungan diplomatic Mempelajari dan melestarikan budaya bangsa
 - b. Menganggap budaya Indonesia yang paling baik
 - c. Memulangkan warga negara yang bersangkutan kenegara asal

- d. Mengirim nota protes kepada pemerintah yang bersangkutan

SEKOLAH RAMAH HAK ASASI MANUSIA (SRH) SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSI DI INDONESIA

Beragam bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah telah memunculkan keprihatinan nasional yang harus direspon dengan cepat, tepat, dan benar. Respon tersebut sangat diperlukan agar kasus-kasus serupa tidak lagi muncul di masa depan. Beberapa cara dan upaya telah ditempuh kementerian / lembaga untuk menghapus kasus-kasus pelanggaran HAM di sekolah. Tapi, upaya tersebut belum mampu menunjukkan hasil yang optimal. Persoalannya karena upaya tersebut dijalankan secara sektoral, tematik, tidak terintegratif, tidak partisipatif, dan tidak berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sekolah Ramah HAM / Human Rights Friendly School (SRH) merupakan pendekatan baru dan berbeda untuk menyelesaikan beragam pelanggaran HAM di sekolah. SRH adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah.

Nilai atau prinsip hak asasi manusia merupakan inti atau ruh dari proses dan pengalaman pembelajaran, dan tercermin dalam segala aspek. Sendi kehidupan sekolah. Pendekatan konsep SRH yang dipadukan dengan konsep pendidikan, diharapkan mampu memberikan jawaban riil untuk menyelesaikan beragam persoalan HAM yang ada di sekolah. Implementasi Konsep SRH akan berjalan optimal bila dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dukungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kementerian/lembaga terkait, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga internasional, dan partisipasi aktif dari seluruh stake holder yang terkait dengan sekolah.

11. Indonesia merupakan salah satu negara berkedaulatan rakyat yang mengakui deklarasi HAM dunia, dari artikel diatas jelaslah bahwa HAM memiliki beberapa prinsip yaitu ...
- a. Utuh
 - b. Saling bergantung
 - c. Kodrati
 - d. Hakiki
 - e. Tetap

Bacalah Teks berikut untuk menjawab soal Nomor 12-13!

Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Indonesia sebagai negara demokrasi sedang menghadapi tantangan baru yang sangat menarik. Hajat pesta demokrasi yang mulanya terpisah di setiap daerah, kini akan dilaksanakan secara serentak nasional pada tahun 2024 mendatang. Permasalahan menarik yang dikaji dalam artikel ini adalah pertama, dinamika penundaan Pilkada pada tahun 2024 bagi 271 daerah yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023.

Kedua, urgensi perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah hingga tahun 2024. Kajian yang disajikan dalam tulisan ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis yang diperoleh terhadap permasalahan tersebut menyimpulkan bahwa pertama, penundaan Pilkada dari tahun 2022 dan 2023 ke tahun 2024 yang kemudian mengakibatkan terjadinya kekosongan terhadap jabatan Kepala Daerah di 271 daerah.

Kemudian, dilakukan pengangkatan penjabat Kepala Daerah yang akan memimpin selama satu sampai dua tahun untuk memberikan ketidakpastian terhadap demokrasi di daerah yang menimbulkan banyak pro dan kontra atas kebijakan yang diambil, hal tersebut dikhawatirkan akan menciderai prinsip-prinsip otonomi daerah. Kedua, untuk menghindari pengisian penjabat Kepala Daerah di 271 daerah tersebut, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dan demokratis, sehingga penjabat yang memimpin daerah selama satu sampai dua tahun ini diharapkan tidak menuai perbedaan pendapat ditengah-tengah masyarakat dengan masa kepemimpinan sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan.

12. Penundaan Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan Peraturan Dalam Negeri yaitu :
- a. No: 10 Tahun 2016
 - b. No. 211 Tahun 2005
 - c. No. 70 Tahun 2020
 - d. No. 185 Tahun 2012
 - e. No. 11 Tahun 2016

13. Pemilihan Kepala Daerah merupakan prinsip demokrasi secara universal, yang merupakan tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia modern karena ...
 - a. Mendapat bantuan dana dari negara lain
 - b. Merujuk system pemilihan Kepala Daerah
 - c. Menunjukkan kebebasan berpolitik tanpa batas
 - d. Menerapkan asas pemilihan yang bebas dan fair
 - e. Mencerminkan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik

Bacalah Teks berikut untuk menjawab soal Nomor 14-16!

Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P)

Krisis kemanusiaan pada abad ke-21 merupakan sebuah isu yang menjadi tantangan besar dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis suatu negara menjadi topik terkini untuk diperdebatkan di era demokrasi yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai negara yang tengah menuju demokrasi, Myanmar menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi antara pemerintah Myanmar dengan salah satu etnis minoritas dibagian Rakhine Utara. Kekerasan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya dilatarbelakangi, karena Rohingya dianggap sebagai illegal migrant dari Bangladesh yang dikenal sebagai suku Bengali. Sebagai negara yang memiliki pengalaman serupa, Indonesia memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi Myanmar dalam menyelesaikan konflik tersebut. Indonesia telah, sedang dan akan terus mendorong Pemerintah Myanmar untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan komprehensif serta mendorong Pemerintah Myanmar dalam proses rekonsiliasi dan penyelesaian secara damai. Berdasarkan prinsip hukum internasional tanggung jawab untuk melindungi atau Responsibility to Protect (R2P).

14. Peran Indonesia dalam kasus Etnis Rohingya sudah sesuai dengan landasan politik luar negeri Indonesia yaitu ...
 - A. Konstitusional, bebas, terpimpin
 - B. Idiil, Konstitusional, dan operasional
 - C. Idiil, Konstitusional dan terpimpin
 - D. Terpimpin, idiil dan bebas
 - E. Bebas, Idiil dan Konstitusional
15. Pemerintah Indonesia mendukung Pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya dalam proses rekonsiliasi dan penyelesaian secara damai berdasarkan prinsip Internasional yaitu...
 - A. Putusan Pemerintah
 - B. Dokumen Kontrak
 - C. Prinsip Teritorial
 - D. Keputusan Dewan Keamanan PBB
 - E. Prinsip Hak Kemanusiaan
16. Mengacu pada artikel diatas pilihkan 3 jawaban dari asas-asas hubungan Internasional berdasarkan kekuasaan negara menurut resolusi PBB ...
 - A. Asas Teritorial
 - B. Asas Kemanusiaan
 - C. Asas Keterbukaan
 - D. Asas Persamaan, Martabat, dan Derajat
 - E. Asas Kepentingan Bersama

Bacalah Teks berikut untuk menjawab soal Nomor 17-18!

SEKOLAH RAMAH HAK ASASI MANUSIA (SRH) SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSI DI INDONESIA

Beragam bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah telah memunculkan keprihatinan nasional yang harus direspon dengan cepat, tepat, dan benar. Respon tersebut sangat diperlukan agar kasus-kasus serupa tidak lagi muncul di masa depan. Beberapa cara dan upaya telah ditempuh kementerian / lembaga untuk menghapus kasus-kasus pelanggaran HAM di sekolah. Tapi, upaya tersebut belum mampu menunjukkan hasil yang optimal. Persoalannya karena upaya tersebut dijalankan secara sektoral, tematik, tidak terintegratif, tidak partisipatif, dan tidak berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sekolah Ramah HAM / Human Rights Friendly School (SRH) merupakan pendekatan baru dan berbeda untuk menyelesaikan beragam pelanggaran HAM di sekolah. SRH adalah sebuah

sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah. Nilai atau prinsip hak asasi manusia merupakan inti atau ruh dari proses dan pengalaman pembelajaran, dan tercermin dalam segala aspek. Sendi kehidupan sekolah. Pendekatan konsep SRH yang dipadukan dengan konsep pendidikan, diharapkan mampu memberikan jawaban riil untuk menyelesaikan beragam persoalan HAM yang ada di sekolah. Implementasi Konsep SRH akan berjalan optimal bila dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dukungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kementerian/lembaga terkait, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga internasional, dan partisipasi aktif dari seluruh stake holder yang terkait dengan sekolah.

17. Dari bacaan diatas pilihlah 3 jawaban yang paling benar dari Sifat dan Unsur HAM yaitu ...

- A. Hakiki dan kodrati
- B. Absolut
- C. Universal
- D. Bersama
- E. Utuh

18. Jawablah pernyataan dibawah ini dengan memilih B jika "Benar" dan S "Salah"

- 1) Bullying yang terjadi di kalangan remaja sangat berpengaruh terhadap korban (B-S)
- 2) Tindakan Bullying yang dilakukan oleh seorang anak maupun kelompok anakn adalah bentuk pelanggaran HAM (B-S)
- 3) Bullying menjadikan siswa bisa bergaul dengan baik terhadap lingkungannya (B-S)

Bacalah Teks berikut untuk menjawab soal Nomor 19-20!

Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Indonesia sebagai negara demokrasi sedang menghadapi tantangan baru yang sangat menarik. Hajat pesta demokrasi yang mulanya terpisah di setiap daerah, kini akan dilaksanakan secara serentak nasional pada tahun 2024 mendatang. Permasalahan menarik yang dikaji dalam artikel ini adalah pertama, dinamika penundaan Pilkada pada tahun 2024 bagi 271 daerah yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023. Kedua, urgensi perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah hingga tahun 2024. Kajian yang disajikan dalam tulisan ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis yang diperoleh terhadap permasalahan tersebut menyimpulkan bahwa pertama, penundaan Pilkada dari tahun 2022 dan 2023 ke tahun 2024 yang kemudian mengakibatkan terjadinya kekosongan terhadap jabatan Kepala Daerah di 271 daerah. Kemudian, dilakukan pengangkatan penjabat Kepala Daerah yang akan memimpin selama satu sampai dua tahun untuk memberikan ketidakpastian terhadap demokrasi di daerah yang menimbulkan banyak pro dan kontra atas kebijakan yang diambil, hal tersebut dikhawatirkan akan menciderai prinsip-prinsip otonomi daerah. Kedua, untuk menghindari pengisian penjabat Kepala Daerah di 271 daerah tersebut, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dan demokratis, sehingga penjabat yang memimpin daerah selama satu sampai dua tahun ini diharapkan tidak menuai perbedaan pendapat ditengah-tengah masyarakat dengan masa kepemimpinan sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan.

19. Dari artikel diatas pilihlah 3 jawaban dari beberapa prinsip-prinsip demokrasi yaitu ...

- A. Demokrasi dengan mengedepankan Kebinekaan
- B. Demokrasi dengan Rule of Law
- C. Demokrasi dengan Kepentingan Kekeluargaan
- D. Demokrasi yang berkeadilan sosial
- E. Demokrasi dengan otonomi daerah

20. Jawablah pernyataan dibawah ini dengan memilih B jika "Benar" dan S "Salah"

- 1) Penundaaan Pemilihan Kepada Daerah 2024 tidak berpengaruh sama sekali dalam kehidupa pemerintahan. (B-S)
- 2) Penundaaan Pemilihan Kepada Daerah 2024 bertentangan dengan UUD 1945 (B-S)
- 3) Pengangkatan Kepala Daerah sementara untuk menggantikan Pejabat yang sudah habis masa jabatannya bertentangan dengan per undang-undangan (B-S)

Bacalah Teks berikut untuk menjawab soal Nomor 21-24!

Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

Pelanggaran hak warga negara dapat terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana seharusnya diatur oleh Undang-Undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari kelalaian atau pengingkaran kewajiban. Baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Di Masa modern seperti sekarang dimana semua informasi dapat diakses dan terbuka untuk umum tidak menjadi solusi untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi di Indonesia.

21. Dari uraian di atas pilihlah satu jawaban yang tepat !

Seorang pejabat yang tertangkap tangan melakukan penyuapan divonis bebas karena dinyatakan tidak bersalah. Namun seseorang menengambil pisang di pekarangan orang lain dionis 1 tahun penjaratanpa diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Peristiwa ini menunjukan terjadi pelanggaran hak warga negara sebagaimana diamanatkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya....

- a. Pasal 26 ayat (1)
 - b. Pasal 26 ayat (2)
 - c. Pasal 26 ayat (3)
 - d. Pasal 27 ayat (1)
 - e. Pasal 27 ayat (2)
22. Salah satu cara untuk mewujudkan hak dan kewajiban agar dapat seimbang maka kita harus mampu mengendalikan diri yang diwujudkan dengan....
- a. Membedakan mana yang meaanjadi hak dan kewajibannya
 - b. Melakukan kesepakatan yang dibuat pembentuk Negara
 - c. Menahan segala keinginan yang timbul dari hawa nafsu
 - d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Melaporkan pengingkaran kewajiban yang dilakukan orang lain
 - f.
23. Kewajiban warga negara dalam pembelaan negara merupakan wujud...
- a. Cinta tanah air dan bangsa
 - b. Pelaksanaan hak dan kewajiban
 - c. Kesukarelaan warga negara
 - d. Tanggung jawab pada bangsa dan negara
 - e. Partisipasi warga negara pada bangsa dan negara
24. Berikut yang termasuk pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat adalah....
- a. Menolong korban bencana alam
 - b. Meringankan penderitaan orang yang teraniaya
 - c. Melarang tindakan main hakim sendiri
 - d. Menghalangi umat beragama lain untuk beribadah
 - e. Melarang masyarakat membuang sampah sembarangan

Perlindungan dan Penegakan Hukum

Pasal 28 D UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum. Perlindungan hukum mendorong adanya aturan yang bisa menjamin hak-hak warga negara. Jaminan tersebut bisa berupa dokumen yang bersifat tertulis.

Dari uraian diatas, soal no 25 s/d pilihlah 3 jawaban yang tepat pada setiap soal !

25. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila....
 - a. Adanya jaminan kepastian hukum
 - b. Adanya ketentuan hukum di dalam UUD Tahun 1945
 - c. Tidak adanya sanksi bagi para pihak
 - d. Adanya pasal- pasal yang mengatur
 - e. Hukum diberikan oleh pemegang kekuasaan tertinggi
26. Terdakwa mendapat penjelasan tentang hak dan kewajiban selama proses persidangan dengan didampingi pengacara. Pernyataan tersebut menunjukkan
- a. Proses beracara di pengadilan pidana selalu diawali dengan penjelasan hak dan kewajiban terdakwa.

- b. Pengadilan memberikan tugas kepada pengacara untuk menjelaskan hak dan kewajiban terdakwa
 - c. Terdakwa akan didampingi pengacara selama 12 jam sampai kasus hukum selesai
 - d. Pengacara bertugas menggantikan peran terdakwa dalam proses pemeriksaan
 - e. Sistem hukum di Indonesia tetap melindungi hak-hak terdakwa
27. Prilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum dalam lingkungan bermasyarakat adalah....
- a. Mematuhi pemerintahan yang sah
 - b. Pemilik saham atas Negara
 - c. Mematuhi peraturan pemerintah sesuai UUD NRI Tahun 1945
 - d. Tidak melanggar hukum yang berlaku di negara tersebut
 - e. Pemegang kedaulatan Negara

SEKOLAH RAMAH HAK ASASI MANUSIA (SRH) SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSI DI INDONESIA

Beragam bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah telah memunculkan keprihatinan nasional yang harus direspon dengan cepat, tepat, dan benar. Respon tersebut sangat diperlukan agar kasus-kasus serupa tidak lagi muncul di masa depan. Beberapa cara dan upaya telah ditempuh kementerian / lembaga untuk menghapus kasus-kasus pelanggaran HAM di sekolah. Tapi, upaya tersebut belum mampu menunjukkan hasil yang optimal. Persoalannya karena upaya tersebut dijalankan secara sektoral, tematik, tidak terintegratif, tidak partisipatif, dan tidak berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Ramah HAM / Human Rights Friendly School (SRH) merupakan pendekatan baru dan berbeda untuk menyelesaikan beragam pelanggaran HAM di sekolah. SRH adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah. Nilai atau prinsip hak asasi manusia merupakan inti atau ruh dari proses dan pengalaman pembelajaran, dan tercermin dalam segala aspek. Sendi kehidupan sekolah. Pendekatan konsep SRH yang dipadukan dengan konsep pendidikan, diharapkan mampu memberikan jawaban riil untuk menyelesaikan beragam persoalan HAM yang ada di sekolah. Implementasi Konsep SRH akan berjalan optimal bila dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dukungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kementerian/lembaga terkait, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga internasional, dan partisipasi aktif dari seluruh stake holder yang terkait dengan sekolah.

28. Cocokkanlah argument berikut sesuai teks diatas!

PREMIS

1. Wujud dari implementasi hak konstitusi di Indonesia
2. hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya
3. tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya

RESPON

1. HAM
 2. Bullying
 3. SRH
29. Cocokkanlah argument berikut!
- a. Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik....
 - b. Negara Indonesia pernah berbentuk sebagai negara Republik Indonesia Serikat
- 1) Negara Indonesia pernah berbentuk sebagai negara Republik Indonesia Serikat
 - 2) pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
30. Cocokkanlah argument berikut!
- a. Agar pelanggaran hak dapat dikurangi atau dicegah maka pelanggar hak sebaiknya....
 - b. Pelanggaran hak warga negara dapat tercipta akibat kurangnya pengawasan secara maksimal, Contoh pelanggaran hak warga negara
- 1) Tidak mendapat kesempatan memilih dalam PEMILU
 - 2) Diberi sanksi hukuman sesuai hukum yang berlaku

